

## **Analisis Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie**

**Ali Murtadha**

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

[murthadasigli123@gmail.com](mailto:murthadasigli123@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effectiveness of the Community Empowerment and Village Government Office in improving the performance of the apparatus of Lampoh Krueng Village, Sigli City District, and the factors that hinder the improvement of the performance of the apparatus of Lampoh Krueng Village, Sigli City District. This study uses a qualitative descriptive method, namely the results of the research are described concretely according to the events that occurred in the research object.*

*The results of this study are based on the facts that several roles of the Community Empowerment and Village Government Office of Pidie Regency that are considered effective have been implemented, namely in the form of implementing training and technical guidance to village officials, including the village head, secretary, and other staff in Lampoh Krueng Village. The training provided includes (1) Training on preparing the Village Revenue and Expenditure Budget and the Village Medium-Term Development Plan (2) Technical guidance on village financial management based on the Siskeudes application (3) Assistance in reporting and implementing food security programs. The obstacles faced by the apparatus in improving performance are caused by several things such as the lack of human resources from the Lampoh Krueng village, limited work equipment such as laptops and internet networks, the lack of understanding of residents regarding administrative requirements that hinder services so that they become a burden on the village apparatus, the absence of ongoing training from the Community Empowerment Service and the Village Government and delays in the disbursement of village/gampong funds.*

**Keywords:** *Community, Empowerment, Lampoh Krueng*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong dalam meningkatkan kinerja aparatur Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli dan faktor-faktor yang menghambat peningkatan kinerja aparatur Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta bahwa beberapa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong kabupaten Pidie yang dinilai efektif telah dijalankan yaitu berupa pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur gampong, termasuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat lainnya di Gampong lampoh Krueng, pelatihan yang diberikan berupa (1) Pelatihan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (2) Bimbingan teknis pengelolaan

keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes (3) Pendampingan dalam pelaporan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Adapun hambatan aparatur dalam meningkatkan kinerja disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya Sumber daya manusia dari gampong Lampoh Krueng, keterbatasan sarana prangkat kerja seperti laptop dan jaringan internet, Kurangnya pemahaman warga atas persyaratan administrasi menghambat pelayanan sehingga menjadi beban perangkat Gampong, tidak adanya pelatihan berkelanjutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong serta keterlambatan pencairan dana desa/gampong.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, masyarakat, Lampoh Krueng

## 1. Pendahuluan

Pemerintah Gampong memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong (DPMG) hadir sebagai lembaga yang memiliki mandat penting dalam mengawal dan membina aparatur pemerintah Gampong. DPMG menjalankan fungsi strategis dalam memberikan pendampingan teknis, menyelenggarakan program peningkatan kapasitas, serta memfasilitasi berbagai pelatihan bagi perangkat Gampong. Lembaga ini juga berperan dalam mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan Gampong yang efektif, transparan, dan akuntabel. DPMG secara aktif melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah Gampong, memberikan konsultasi teknis dalam pengelolaan keuangan Gampong, serta membantu merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi fungsi pemerintahan Gampong.

Salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Kota Sigli yaitu Gampong Lampoh Krueng memiliki karakteristik dan memerlukan kajian untuk memahami dinamika wilayahnya. Dalam konteks struktur pemerintahan, Gampong Lampoh Krueng memiliki sistem administrasi yang tersusun secara hierarkis dan sistematis. Setiap Gampong di wilayah ini dipimpin oleh seorang Keuchik (kepala desa) yang dibantu

oleh perangkat Gampong seperti Sekretaris Gampong, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun. Perangkat Gampong ini bekerja secara kolaboratif dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat Gampong, dimana setiap jabatan memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme kerja pemerintahan Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli menerapkan prinsip musyawarah dan gotong royong, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pada kajian mengenai kinerja aparatur Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli berbagai aspek perlu dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Kinerja aparatur Gampong, sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling dasar, memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Gampong yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam kinerja aparatur Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli:

1. Pertama, dari segi kedisiplinan, masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. Beberapa aparatur Gampong tercatat sering datang terlambat dan pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan, yang berdampak

- pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Kedua, dalam hal kompetensi dan pemahaman tugas, masih terdapat aparatur desa Gampong yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan dalam menyelesaikan administrasi desa Gampong secara tepat waktu, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur operasional standar dalam pelayanan publik. Kondisi ini diperparah dengan minimnya program pengembangan kapasitas yang diikuti oleh aparatur Gampong.
  3. Ketiga, aspek responsivitas dalam melayani masyarakat juga menjadi sorotan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa aparatur Gampong kurang tanggap dalam menindaklanjuti keluhan dan permintaan layanan dari masyarakat. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan waktu penyelesaian layanan yang tidak sesuai standar menjadi keluhan utama masyarakat.
  4. Keempat, dalam hal pengelolaan administrasi dan dokumentasi, ditemukan beberapa kelemahan seperti pengarsipan yang tidak teratur, pencatatan yang tidak sistematis, dan pelaporan yang tidak tepat waktu. Hal ini berpotensi menghambat proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan Gampong.

Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong (DPMG) dengan berbagai lembaga terkait. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur desa Gampong di wilayah tersebut. Program-program ini dirancang secara sistematis dan berkelanjutan dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan

Gampong yang lebih efektif dan profesional.

Salah satu program unggulan yang telah diimplementasikan adalah pelatihan manajemen pemerintahan Gampong. Program ini mencakup berbagai aspek penting seperti administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan Gampong, perencanaan pembangunan Gampong, dan pelayanan publik. Para aparatur Gampong dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hasilnya, tercatat peningkatan signifikan dalam hal tertib administrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Tingkat partisipasi aparatur Gampong dalam program pemberdayaan belum merata. Selain itu, implementasi hasil pelatihan kadang terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana di Gampong. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan program secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa program-program pemberdayaan yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja aparatur di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli. Meskipun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan dampak positif program pemberdayaan tersebut.

## **2. Kajian Pustaka**

### **Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Berbagai definisi pemberdayaan menurut para ahli diatas dapat kita jadikan sebagai rujukan dalam menganalisa konsep pemberdayaan masyarakat Islam. Islam adalah agama yang sempurna, Islam

merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan cara serta solusi terhadap problematika kehidupan, baik masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, politik, mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Selain itu, Islam adalah agama yang membebaskan, membebaskan dari ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan ditengah-tengah masyarakat. Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “empowerment”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018).

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people centered (berpusat pada manusia), Participatory (partisipatif), empowering (memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan) (Alfitri, 2011).

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki

kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan kan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain

Islam mencoba membuat konsep tentang pemberdayaan masyarakat Islam. Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah. Namun kegiatan dakwah yang sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigma dakwah konvensional yang masih terfokus kepada ibadah vertikal (hubungan Allah dengan hambanya). Paradigma dakwah yang lebih kepada perubahan social secara nyata. Yaitu hubungan vertikal (hubungan Allah dengan hambanya) sekaligus hubungan horizontal (hubungan sesama manusia). Dengan demikian konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi

baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional

### 3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Metode penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai status gejala pada saat penelitian dilakukan dan menyajikannya apa adanya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan kombinasi antara penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, diharapkan peneliti dapat menggali dan memahami secara mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka akan memberikan informasi yang kaya dan rinci, sehingga dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara holistik.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa penelitian ini juga ditempuh berdasarkan tujuan untuk memahami bagaimana Analisis fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan gampong dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

### 4. Pembahasan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong (DPMG) merupakan institusi strategis di tingkat pemerintah daerah yang memiliki peran vital dalam pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan. Lembaga ini hadir sebagai manifestasi komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Gampong yang mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPMG tidak hanya berfokus pada aspek administratif pemerintahan Gampong, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Gampong (DPMG) memiliki fungsi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
    - a. Membantu Bupati/Walikota dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Desa/Gampong.
    - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/ Gampong.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/ Gampong.:
    - a. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ Gampong.
    - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa/ Gampong.
    - c. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/ Gampong.
  3. Peraturan Daerah setempat: Fungsi-fungsi spesifik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah masing-masing.
- Secara umum, DPMG berperan dalam:
- a. Pemberdayaan masyarakat desa/

Gampong.

- b. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/ Gampong.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi program-program pembangunan desa/ Gampong.
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ Gampong.

Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Gampong (DPMG) memiliki Tugas dan Fungsi Umum yang menjadi tolak ukur kinerja dinas, secara umum, DPMG memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas Pokok:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong.
2. Mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Memfasilitasi pengelolaan dana desa/gampong.

Adapun Fungsi Utama dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Gampong (DPMG):

1. Pemberdayaan masyarakat: Membantu masyarakat agar mampu mandiri secara sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Pembinaan pemerintahan gampong: Meningkatkan kapasitas aparatur gampong, termasuk pelatihan perangkat gampong.
3. Pengembangan kelembagaan masyarakat: Seperti Lembaga Tuha Peut, PKK, Karang Taruna, dan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong).
4. Fasilitasi penggunaan dana desa: Memastikan dana digunakan tepat

asaran dan akuntabel.

Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Gampong (DPMG) memiliki Program-Program Unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Gampong. Beberapa program yang umum dijalankan oleh DPMG antara lain:

1. Pelatihan aparatur gampong
2. Peningkatan kapasitas BUMG
3. Pembangunan partisipatif masyarakat
4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa

Pendampingan masyarakat melalui tenaga pendamping desa

Efektivitas Peran DPMG dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie melihat seberapa efektif peran DPMG dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli. Beberapa faktor perlu diperhatikan sebagai tolak ukur peningkatan efektivitas peran DPMG sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bagian dari Dinas pemberdayaan dan pemerintahan Gampong (DPMG) kabupaten Pidie diketahui bahwa pemerintah telah melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur gampong, termasuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat lainnya di Gampong lampoh Krueng, pelatihan yang diberikan berupa (1) Pelatihan penyusunan APBG dan RPJMG (2) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes (3) Pendampingan dalam pelaporan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Pembinaan ini dinilai berdampak pada meningkatnya kemampuan aparatur di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dalam menyusun

perencanaan Gampong secara partisipatif, serta meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan.

DPMG kabupaten Pidie menjelaskan bahwa dalam upaya mendorong efektivitas, aparatur Gampong melaksanakan pemanfaatan dana desa/Gampong melalui (1) Program ketahanan pangan yaitu budidaya tanaman hortikultura dan ayam petelur skala rumah tangga, (2) Peningkatan sarana pelayanan publik gampong (3) Pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda. Namun, realisasi program pemberdayaan masih rendah. Data semester awal tahun 2025 menunjukkan bahwa serapan anggaran pemberdayaan masyarakat di Lampoh Krueng baru mencapai 47,6%, yang menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan anggaran belum optimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi DPMG untuk meningkatkan pendampingan teknis.

Penjelasan yang disampaikan oleh pihak Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Gampong (DPMG) kabupaten Pidie telah memberikan fasilitas berupa penerapan sistem informasi gampong seperti OpenSID yang dilakukan sebagai bentuk upaya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Sistem ini dilakukan sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan data penduduk/masyarakat Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, data penduduk tersebut berupa administrasi surat-menyurat dan pelaporan keuangan. Pihak dinas DPMG kabupaten Pidie juga telah melakukan evaluasi dan monitoring kepada Gampong Lampoh Krueng. Evaluasi yang dilakukan berupa kunjungan tim fasilitator kecamatan Kota Sigli yang dibentuk DPMG Kabupaten Pidie dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi capaian program dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Dari hasil wawancara bersama dengan aparatur Gampong Lampoh Krueng

Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie mengatakan bahwa pihak aparaturnya beserta dengan masyarakat sangat bekerja sama dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong kabupaten Pidie, hal ini disebabkan oleh dinas DPMG terus melibatkan masyarakat gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli sehingga masyarakat merasa dilibatkan pada setiap aspek perencanaan sampai dengan implementasi suatu program di Gampong tersebut. aparaturnya gampong juga terus melakukan koordinasi antara DPMG dengan kecamatan, inspektorat, BPKAD, Bappeda dan dinas teknis lainnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie merupakan instansi teknis yang memiliki tugas strategis dalam membina, mendampingi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan gampong, termasuk di Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli. Dalam konteks peningkatan kinerja aparaturnya gampong, efektivitas peran DPMG dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yaitu: pembinaan kelembagaan, penguatan kapasitas, fasilitasi penggunaan dana desa/Gampong, dan dukungan terhadap sistem informasi desa/Gampong.

Berdasarkan hasil dari penjabaran diatas, sesuai dengan pengertian dari teori Pemberdayaan masyarakat yaitu proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya yaitu dimana Peran DPMG dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli dilaksanakan dengan melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat serta aparaturnya gampong Lampoh Krueng sehingga dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong berjalan dengan efektif.

### Faktor-Faktor yang Menghambat Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli

Hambatan adalah segala bentuk rintangan, kendala, atau gangguan yang dapat menghalangi, memperlambat, atau menggagalkan pencapaian tujuan, pelaksanaan kegiatan, atau proses kerja. Suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau kendala dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Pada proses Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli Meskipun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie telah menjalankan perannya dalam pembinaan dan pendampingan, peningkatan kinerja aparatur Gampong Lampoh Krueng masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan-hambatan ini berasal dari faktor internal aparatur gampong itu sendiri maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan sistem, regulasi, dan dukungan institusional.

Dari hasil wawancara dilapangan bersama dengan pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong kabupaten Pidie menjelaskan bahwa beberapa faktor yang dapat menghambat peningkatan kinerja sebagai berikut:

Dari hasil wawancara bersama dengan DPMG kabupaten Pidie menjelaskan bahwa hambatan yang menjadi kendala dinas DPMG kabupaten Pidie dalam menjalankan kinerja adalah kurangnya SDM, Banyak aparatur di Gampong Lampoh Krueng belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan teknis yang memadai dalam bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan teknologi informasi. Sehingga hal tersebut berdampak sangat signifikan

terhadap pada administratif pemerintahan gampong seperti: (1) Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh perangkat gampong menjadi salah satu kendala penyelesaian penusunan dokumen perencanaan pelaporan, dikarenakan aparatur membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempelajari dan menyelesaikan (2) Ketergantungan pada pendamping desa/Gampong atau pihak luar serta (3) Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan.

Aparatur menjelaskan kendala yang diperoleh oleh aparatur gampong dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur tentang minimnya pelatihan dan kurangnya penguatan kapasitas yang diterima dari DPMG. Sehingga meskipun pelatihan DPMG kabupaten Pidie dilaksanakan sebagian pelatihan dinilai hanya bersifat mendasar dan tidak ada keberlanjutan. Pelatihan keberlanjutan disini berupa fokus pada praktik teknis yang diberikan sehingga pengelolaan dana desa/gampong, pengadaan barang dan jasa desa, serta penggunaan aplikasi siskeudes dan OpenSID dinilai menjadi penghambatn utama dalam peningkatan kompetensi aparatur, dengan demikian aparatur gampong menilai pelatihan yang dilakukan hanya sebagai formalitas dan administratif.

Dari hasil wawancara aparatur menjelaskan bahwa hambatan aparatur terhadap proses berjalannya kinerja adalah keterbatasan pada sarana pendukung kerja seperti komputer /laptop dan perangkat IT yang terbatas yang menjadi alat utama yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai kebutuhan administrasi, hambatan lainnya juga berupa jaringan internet yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada efesiensi waktu kerja, seras minimnya ruang kerja yang memadai untuk operasional Gampong. Kondisi ini menghambat kinerja

administrative Gampong Lampoh Krueng kecamatan Kota Sigli kabupaten pidie, pelaporan berbasis aplikasi, serta komunikasi dengan instansi pembina seperti kecamatan dan DPMG.

Hambatan lain dari aparatur gampong lampoh Krueng yang dipaparkan oleh kepala desa atau geushiek adalah keterlambatan pencairan dana desa, keterlambatan tersebut berdampak kepada beberapa hal seperti terjadinya penundaan pada pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, keterlambatan tersebut juga berdampak pada penurunan semangat kerja aparatur pemerintahan gampong hal ini disebabkan oleh tertundanya kegiatan yang sedang berjalan, serta kesulitan aparatur dalam mempertahankan jadwal program yang telah direncanakan dari awal.

Dari hasil penjelasan wawancara diatas dapat dilihat sesuai dengan teori kinerja aparatur dimana kinerja seseorang merupakan kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan, yang secara bersama-sama mempengaruhi hasil kerja yang dicapai. Seperti yang dijelaskan bahwa kinerja aparatur telah dijalankan semaksimal mungkin dan sesuai dengan aturan dasar seperti kerjasama antara aparatur gampong dengan masyarakat lampoh Krueng, kerja sama antara aparatur gampong dengan kecamatan serat kerja sama dengan dinas DPMG kabupaten Pidie. kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kombinasi antara kemampuan dan usaha serta kesempatan yang telah diberikan dan didapatkan dan dinilai mampu mempengaruhi hasil kerja yang diinginkan

## 5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang Analisis Fungsi Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur

Pemerintahan di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Sebagai jawaban permasalahan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie telah menjalankan peran dan tugas kerja sesuai dengan aturan, beberapa kinerja DPMG dinilai telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dinilai efektif. Kinerja DPMG dilakukan secara sistematis. Beberapa kinerja DPMG dilakukan guna mempermudah dan meningkatkan kinerja aparatur gampong lampoh Krueng adalah dengan melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur gampong, termasuk kepala desa, sekretaris, dan perangkat lainnya di Gampong lampoh Krueng, pelatihan yang diberikan berupa (1) Pelatihan penyusunan APBG dan RPJMG (2) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes (3) Pendampingan dalam pelaporan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Pembinaan ini dinilai berdampak pada meningkatnya kemampuan aparatur di Gampong Lampoh Krueng Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dalam menyusun perencanaan Gampong secara partisipatif, serta meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan.
2. Dalam menjalankan kinerja aparatur gampong lampoh Krueng mendapati hambatan-hambatan yang berdampak pada terhambatnya prose kinerja aparatur gampong lampoh Krueng kecamatan kota sigli kabupaten Pidie. Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial, seperti pengelolaan APBDes, administrasi, dan sistem keuangan desa (Siskeudes) karena SDM yang kurang terampil dan rendahnya pengalaman, Akses internet dan ketersediaan perangkat (komputer/laptop, jaringan stabil) yang kurang memadai

menghambat pelaporan dan pengelolaan data secara digital, Kurangnya pemahaman warga atas persyaratan administrasi menghambat pelayanan sehingga menjadi beban perangkat Gampong, kurangnya sumberdaya manusia (SDM) masih banyak perangkatn yang tidak menguasai administrasi, tidak adanya pelatihan berkelanjutan dari DPMG terhadap aparatur Gampong lamph Krueng, serta keterlambatan pencairan dana desa/gampong.

#### Daftar Pustaka

- Arianto, B. Warjio, Usman T. (2016). *Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Perangkat Kelurahan*, Jurnal Administrasi Publik, 6 (2): 107-122.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (2011), *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, tentang Pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Arifatullah, A., Gunawan, E., & Munandar, A. (2025). Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 4(1).
- Ainii, A. Q. (2019). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Pongkok Kecamatanamatan Polanharjo Kabupatenupaten Klaten*. Journal of Politic and Government Studies, 8(02), 11-20.
- Arifatullah, A., Gunawan, E., & Munandar, A. (2025). Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 4(1).
- Dewi, I, C. (2011) *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: PT Prestasi Pustakary
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Islami, T. R. (2024). Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 3(2).
- Jarah, I., & Zulfikar, Z. (2023). Kinerja Keuchik Gampong Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Menjalankan Fungsi Dan Peranannya Terhadap Pembangunan. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 2(1).
- Jamal Yenni, Ahmad Mustanir, Adam Latif (2020) *“Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang”*. Jurnal Ilmiah Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Volume 8 Nomor 3 Edisi Oktober 2020
- Kartono, Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja.Grafindo Persada Jakarta.
- Kuswantoro, A (2017), *Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Upaya Pelayanan Prima Bagi Tenaga Kepepndidikan Pasca Sarjana UNNES*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Muzakar Abdullah (2022) *“SOSIOLOGI DESA Perilaku Dalam Perencanaan Pembangunan”*. UNIVERSITAS HAMZANWADI PRESS (Anggota IKAPI). Nusa Tenggara Barat.

- Mulyadi & Rivai. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Letakan Kesembilan.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rahmalena (2016) "*Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong Oleh Keujruen Blang Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya ( Tinjauan Menurut Hukum Islam )*". Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Rahmatullah, R., Nurjannah, N., & Islami, T. R. (2025). Pengelolaan Kearsipan Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 4(1).
- Rijal, A., & Ilyas, M. (2022). *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik di Desa X*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45-55
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Rajawali Pers
- SemarangSumeru, A. (2016). *Kedudukan pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1) 47-56
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. Sukmadinata,
- Putri, A. M., Zulfikar, Z., & Rozaili, R. (2024). Penghasilan Tetap Perangkat Gampong Belum Layak Dibanding Tugas dan Pekerjaannya (Studi Kasus di Gampong Keramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie). *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 3(1).
- Paiza Liva, Ronny Gosal, Donald Monintja (2019) "*Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Kampus Bahu Unsrat Manado, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019.
- Wibowo, A. (2021). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja Aparatur Desa*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Desa*, 8(1), 33-45
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*.
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Marjani, N. (2023). *Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 246-256.
- Zulfikar, Z., & Suriadi, M. (2020). *Strategy of Department of Industry and Cooperation of Pidie Jaya District in Developing Small and Medium Micro Enterprises*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 2458-2464.